



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	: 3 (tiga)
Masa Persidangan	: IV
Tahun Sidang	: 2021-2022
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan RI
Hari, Tanggal	: Rabu, 17 Maret 2022
Pukul	: 13.30 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Mohamad Hekal, M.B.A, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	: 1. Pembahasan mengenai Harga Komoditas dan kesiapan Kementerian Perdagangan dalam Stabilisasi Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok menjelang Puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2. Lain-lain
Hadir	: 1. 52 orang dari 54 Anggota Komisi VI DPR RI 2. Menteri Perdagangan RI, Bapak Muhammad Lutfi 3. Wakil Menteri Perdagangan RI, Bapak Dr. Jerry Sambuaga. Beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan RI pada pukul 13.56 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan RI pada hari Kamis, 17 Maret 2022 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohammad Hekal, M.B.A.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI untuk melakukan tindakan yang antisipatif terkait perkembangan stabilisasi harga dan pasokan Barang Kebutuhan Pokok menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2022 serta melaporkan secara berkala kepada Komisi VI DPR RI.
2. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI ketika kewajaran harga tidak tercapai, maka Pemerintah harus mengeluarkan pengaturan untuk menghentikan ekspor minyak kelapa sawit.
3. Komisi VI DPR RI mendesak Kementerian Perdagangan RI untuk segera berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polri dan aparat penegak hukum dalam menjamin ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng di masyarakat serta menindak tegas para pelaku pelanggaran hukum.
4. Terkait dengan stabilisasi harga dan pasokan kedelai, gandum dan komoditas barang pokok lainnya, Komisi VI DPR RI, mendorong Kementerian Perdagangan RI untuk segera melakukan intervensi pasar/subsidi dan melakukan diversifikasi sumber pasokan untuk mencegah kelangkaan komoditas impor dampak situasi global.
5. Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah, c.q BPKP untuk melakukan audit produksi dari hulu sampai hilir untuk mencari Harga Pokok Produksi (HPP) Minyak Goreng sesuai dengan angka keekonomian.
6. Komisi VI DPR RI dan Menteri Perdagangan RI sepakat merekomendasikan pelaku usaha yang melakukan penyimpangan dan tidak mendukung program pemerintah agar izin usahanya dicabut dan manakala pengusaha tersebut juga mengelola kebun sawit di tanah negara, agar ijin Hak Guna Usaha (HGU) akan dicabut.
7. Komisi VI DPR RI akan membentuk Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok.
8. Komisi VI DPR RI akan memanggil pengusaha produsen kelapa sawit dan produsen serta distributor minyak goreng untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum.
9. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 20.30 WIB.

MENTERI PERDAGANGAN RI

Ttd.

MUHAMMAD LUTFI

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT**

Ttd.

**MOHAMAD HEKAL, M.B.A
A-103**